
Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Mandailing Natal

Oleh:

Erni Yusnita Siregar, M.E
Ekonomi Syariah, STAIN Mandailing Natal
Email: erni10.yusnitasiregar@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengaruh perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi daerah secara kualitatif. PAD merupakan salah satu sumber utama pendanaan bagi pemerintah daerah yang berfungsi dalam mendukung pengembangan infrastruktur dan penyediaan layanan publik. Studi ini menggunakan kualitatif dan analisis dokumen terkait kebijakan pendapatan dan belanja daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan PAD berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, terutama melalui pajak daerah dan retribusi yang terkait dengan sektor pertanian seperti pajak bumi dan bangunan (PBB) pada lahan pertanian, serta retribusi untuk fasilitas pasar atau tempat distribusi hasil pertanian. Semakin tinggi produksi dan luas lahan pertanian, semakin besar potensi pemasukan PAD dari pajak dan retribusi yang langsung berdampak pada penyediaan fasilitas publik dan peningkatan daya saing daerah. Namun, penelitian ini juga menemukan adanya tantangan dalam optimalisasi PAD, seperti kurangnya kapasitas pengelolaan, keterbatasan infrastruktur, serta regulasi yang sering berubah. Penelitian ini merekomendasikan perbaikan dalam tata kelola PAD dan peningkatan transparansi sebagai upaya untuk memaksimalkan kontribusi PAD terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: PAD, Pertumbuhan Ekonomi

1. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi merupakan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat mengalami peningkatan. Dimana kenaikan pendapatan per kapita merupakan suatu pencerminan dari timbulnya perbaikan dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi harus dipahami sebagai suatu proses

multi dimensi yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas dasar struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi Nasional, disamping itu tetap mengejar perubahan pertumbuhan ekonomi, penangan pendapatan, dan pemberantasan kemiskinan (Todaro, 2002).

Sasaran umum pembangunan ekonomi adalah meningkatnya

pertumbuhan ekonomi secara bertahap, terciptanya lapangan kerja yang memadai bagi penurunan pengangguran. Serta berkurangnya jumlah penduduk miskin. Untuk mewujudkan sasaran tersebut ditempuh berbagai program pembangunan terpadu, salah satunya mengurangi pengangguran dan kemiskinan dengan membangkitkan sektor riil agar menciptakan lapangan kerja. Dengan kebijakan ini kegiatan ekonomi akan lebih terdorong untuk memanfaatkan sumber daya manusia yang ada, (Najihah, 2013). Pertumbuhan ekonomi sebagai proses peningkatan output dari waktu ke waktu menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara (Todaro, 2005). Oleh karena itu identifikasi berbagai macam faktor yang mempengaruhinya termasuk peran pemerintah.

Pengeluaran pemerintah sebagai salah satu instrumen penting, kebijakan fiskal diharapkan mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah mengoptimalkan peran tersebut dengan meningkatkan pengeluaran (*share*) terhadap Pendapatan Domestik Bruto. Secara riil pengeluaran pemerintah juga meningkat

sejalan dengan peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB). Mengingat pertumbuhan ekonomi sebagai tolak ukur penilaian pertumbuhan ekonomi nasional. Yang sudah diyakini serta diterapkan secara luas, pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Dengan demikian makin tingginya pertumbuhan ekonomi maka semakin tinggi pula kesejahteraan masyarakat, meskipun terdapat indikator yang lain yaitu distribusi pendapatan (Todaro, 2000).

Perekonomian Kabupaten Mandailing Natal yang diukur berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2023 mencapai Rp 18.322,32 miliar, sedangkan berdasarkan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 10.494,85 miliar. Perekonomian Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2023 bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya tumbuh sebesar 4,93 persen. Hal ini menunjukkan perekonomian di Kabupaten Mandailing Natal semakin membaik. Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum tumbuh sebesar 10,04 persen; diikuti Transportasi dan Pergudangan sebesar 7,26 persen; serta Lapangan Usaha

Pertambangan dan Penggalian sebesar 7,13 persen. (BPS)

Struktur perekonomian Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2023 masih didominasi oleh empat lapangan usaha utama yaitu: Lapangan Usaha Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebesar 48,60 persen; Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,52 persen; Lapangan Usaha Konstruksi sebesar 11,70 persen; serta Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 11,03 persen. Peranan ke empat lapangan usaha tersebut mencapai 84,85 persen terhadap total PDRB Kabupaten Mandailing Natal. Berdasarkan pendekatan produksi pertumbuhan tertinggi berada pada Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 10,04 persen; diikuti Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 7,26 persen dan disusul oleh Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 7,13 persen. Sementara itu, kontribusi Lapangan Usaha Jasa Lainnya; serta Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang terhadap total PDRB secara

keseluruhan memiliki kontribusi terkecil, masing-masing sebesar 0,03 persen dan 0,02 persen. (BPS)

Dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah dalam bentuk pelaksanaan kewenangan fiskal, setiap daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan didaerahnya melalui pendapatan asli daerah (PAD). Tuntutan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan porsenil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi kedaerah.

Salah satu pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah pajak daerah. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi atau suatu badan pemerintahan daerah tanpa imbalan langsung yang nantinya iuran tersebut digunakan untuk membiayai

pelaksanaan pemerinah daerah. (Bambang Prakoso, 2005). Pajak daerah adalah pungutan wajib atas orang pribadi atau badan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan. yang berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah tersendiri, pajak daerah, retribusi, dan pendapatan asli daerah lainnya yang diperbolehkan. Tujuannya adalah untuk memberikan lebih banyak pilihan kepada daerah dalam memperoleh dana untuk pelaksanaan otonomi. daerah sebagai pelaksana prinsip desentralisasi (Rori, 2016). Sumber pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mandailing Natal dari tahun ke tahun, pertumbuhan lapangan usaha pertanian, perikanan dan kehutanan masih mendominasi. Penciptaan sumber pertumbuhan Kabupaten Mandailing Natal tertinggi kedua adalah lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, dan

reparasi mobil dan sepeda motor (BRS. 2023).

2. KERANGKA TEORI

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang berdasarkan peraturan daerah, dan perundang-undangan pemerintah. Untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai roda organisasi pemerintah daerah. (Kuncoro, 2014). Sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari beberapa pendapatan yaitu sebagai berikut :

a. Pajak Daerah

Secara umum Pajak Daerah memberikan kontribusi terbesar terhadap penerimaan Pendapatan asli daerah. Pajak Daerah merupakan pungutan yang

Jenis pajak yang terdapat di Kabupaten/Kota terdiri dari:

✓ Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan

termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga, hotel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (Himpunan Peraturan Perundang-undang Republik Indonesia. 2015).

Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Yang dimaksud dengan jasa penunjang adalah fasilitas telepon, facsimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.

✓ Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan

dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/*catering*.

Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikondisikan oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun ditempat lain. Berdasarkan ketentuan ini, maka layanan antar (*delivery service*) atau pemesanan dibawa (*take away order*), tetap dikenakan pajak restoran walaupun tidak menikmati fasilitas sarana restoran.

✓ Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan

dengan dipungut bayaran. Bentuk hiburan yang dikenakan pajak adalah terbatas Pendapatan Asli Daerah.

✓ Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, mengajukan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

✓ Pajak Penerangan Jalan

pajak penerangan jalan adalah pajak yang dipungut dari hasil penggunaan tenaga listrik. Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari lain. Listrik yang dihasilkan sendiri meliputi seluruh pembangkit listrik.

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara yang berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Menurut Sukirno (2000) pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Sehingga pertumbuhan dapat diartikan sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam kenaikan pendapatan nasional. Dan menurut Simon Kuznet Pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negeri (daerah) yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya, yang terwujud dengan adanya kenaikan output nasional secara terus menerus yang disertai dengan kemajuan teknologi serta adanya penyesuaian kelembagaan, sikap dan ideologi yang dibutuhkan.

2. Pertumbuhan Ekonomi

Teori Pertumbuhan Ekonomi Keynes

Keynes menyatakan bahwa pendapatan total merupakan fungsi dari pekerjaan total dalam suatu negara. Semakin besar pendapatan nasional, semakin besar volume pekerjaan yang dihasilkannya, demikian sebaliknya. volume pekerjaan tergantung kepada permintaan yang efektif. permintaan efektif menentukan tingkat keseimbangan pekerjaan dan pendapatan. Permintaan efektif ditentukan pada titik saat harga permintaan agregat sama dengan penawaran agregat. permintaan efektif terdiri dari permintaan konsumsi dan investasi. permintaan konsumsi tergantung pada cenderung untuk mengkonsumsi yang disebut terakhir ini tidak meningkat secepat kenaikan pendapatan. Jurang antara pendapatan dan konsumsi dapat dijembati oleh investasi. jika volume investasi yang diperlukan tak terpenuhi maka harga permintaan agregat akan turun, lebih rendah daripada harga penawaran agregat. Akibatnya, pendapatan dan

pekerjaan akan turun sampai jurang tersebut terjembati. jadi perbedaan antara pekerjaan dan pendapatan ini sebagai besar akan bergantung pada investasi. (Jhingan, 2000)

Teori Pertumbuhan Ekonomi Endogen

Teori ini menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor dalam suatu daerah, seperti investasi dalam pendidikan, infrastruktur, dan teknologi. Dalam konteks PAD, ini berarti bahwa daerah yang mampu mengoptimalkan pendapatannya dari pajak, retribusi, dan hasil pengelolaan aset daerah bisa lebih mandiri dalam mendanai proyek-proyek yang memperkuat daya saing ekonomi lokal. Dengan meningkatkan kualitas infrastruktur dan layanan publik, PAD berkontribusi langsung terhadap produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

3. METODE PENELITIAN

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah menganalisis data sekunder, dengan berbagai referensi yang terkait dengan tema permasalahan. Disamping itu juga membandingkan

pendapat para ahli serta fenomena dan realitas perkembangan ekonomi yang ada. Termasuk data-data pendukung yang sifatnya sekunder.

Untuk mendapatkan fakta dan penafsiran yang tepat maka pendekatan yang digunakan kualitatif yang lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif dan melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan data secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk disimpulkan dan dipahami dan kesimpulan yang diberikan selalu jelas dasar faktualnya sehingga semuanya dapat dikembalikan langsung pada data yang diperoleh (Saifuddin Aswar, 1998: 6). Penelitian ini menggunakan data sekunder, yang bisa diperoleh dari:

- Badan Pusat Statistik (BPS) daerah, yang menyajikan data PDRB dan PAD secara tahunan.
- Laporan keuangan pemerintah daerah.
- Data publikasi lain terkait indikator ekonomi daerah.

Berikut adalah rumusan penelitian yaitu: Bagaimana Perkembangan

PAD terhadap pertumbuhan Ekonomi di Mandailing Natal?

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perekonomian Mandailing Natal tahun 2023 tumbuh 4,93 persen. Mengalami peningkatan dibanding dengan tahun 2022 dengan pertumbuhan sebesar 4,34 persen. Berdasarkan pendekatan produksi lapangan usaha pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 10,04 persen; diikuti Transportasi dan Pergudangan sebesar 7,26 persen; serta Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 7,13 persen. Tiga lapangan usaha yang memberi peran dominan terhadap PDRB Kabupaten Mandailing Natal menurut lapangan usaha pada tahun 2023 yaitu: Lapangan Usaha Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebesar 48,60 persen; Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,52 persen; serta Lapangan Usaha Konstruksi sebesar 11,70 persen. Bila dilihat dari pendekatan pengeluaran, pertumbuhan untuk Komponen Konsumsi LNPRRT sebesar 9,30 persen; disusul Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto

sebesar 6,93 persen; Komponen Pengeluaran Pemerintah sebesar 4,86 persen; serta Komponen Konsumsi Rumah Tangga sebesar 4,46 persen. Berdasarkan sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) memberi kontribusi terbesar yaitu sebesar 62,43 persen; menyusul Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 20,79 persen; dan Komponen Konsumsi Pemerintah sebesar 13,61 persen. Secara nominal, PDRB Kabupaten Mandailing Natal tahun 2023 atas dasar harga berlaku mencapai Rp 18.322,32 miliar dan PDRB Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2023 atas dasar harga konstan mencapai Rp 10.494,85 miliar.

Tabel 1.1 Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Mandailing Natal (Rupiah) Tahun 2013-2023

Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Konstan
2013	6.606,44
2014	7.034,93
2015	7.471,72
2016	7.933,13
2017	8.416,50
2018	8.904,14
2019	9.376,46
2020	9.288,65
2021	9.585,90
2022	10.001,97
2023	10.494,85

Sumber: BPS Mandailing Natal. 2023 (Data diolah)

Pada tabel diatas produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita atas dasar harga konstan Kabupaten Mandailing Natal (Rupiah) tahun 2013-2023 mengalami kenaikan terus menerus. Berarti PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Mandailing Natal menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga konstan pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar selalu mengalami peningkatan. Pertumbuhan ekonomi di Mandailing Natal, yang diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), juga dipengaruhi oleh kontribusi sektor-sektor tersebut. Sektor pertanian, misalnya, menyumbang lebih dari 50% terhadap PDRB dan tetap menjadi sektor utama bagi perekonomian daerah, meskipun kontribusinya mengalami penurunan bertahap. Sektor perdagangan dan konstruksi juga berkontribusi signifikan, yang mana pertumbuhannya berkaitan dengan dinamika PAD dari aktivitas ekonomi loka. Untuk data PAD dapat dilihat di tabel 1.2 yaitu:

Tabel 1.2 Pendapatan Asli Daerah atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Mandailing

**Natal (Rupiah) Tahun
2013-2023**

Tahun	Pendapatan Asli Daerah
2013	918.035.594
2014	1.098.195.156
2015	1.365.524.435
2016	1.540.830.382
2017	1.609.214.183
2018	1.570.693.891
2019	2.107.959.595
2020	1.624.622.586
2021	1.689.954.783
2022	1.622.439.803
2023	1.685.162.492

Sumber: BPS Mandailing Natal. 2023 (Data diolah)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat pendapatan asli daerah Mandailing Natal dari tahun 2013 sampai tahun 2019 terus mengalami peningkatan dari Rp. 918.035.594 hingga Rp 2.107.959.595. di tahun-tahun berikutnya pendapatan asli daerah dari tahun 2020 sampai 2023 mengalami fluktuasi. Di tahun 2023 pendapatan Asli Daerah mencapai 1.685.162.492 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Perkembangan PAD Kabupaten Mandailing Natal dalam beberapa tahun terakhir, PAD Kabupaten Mandailing Natal menunjukkan tren fluktuatif. Data ini penting untuk menilai kemampuan daerah dalam mengumpulkan pendapatan asli secara mandiri. Sumber PAD seperti pajak daerah, retribusi,

hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan pendapatan lain-lain menjadi fokus utama. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) setempat, kontribusi sektor unggulan seperti pertanian, perdagangan, dan konstruksi merupakan penggerak utama PAD di daerah ini. Pemerintah daerah memperoleh pendapatan melalui pajak dan retribusi yang terkait dengan sektor pertanian, seperti pajak bumi dan bangunan (PBB) pada lahan pertanian, serta retribusi untuk fasilitas pasar atau tempat distribusi hasil pertanian. Semakin tinggi produksi dan luas lahan pertanian, semakin besar potensi pemasukan PAD dari pajak dan retribusi.

Sektor pertanian dapat mendorong pertumbuhan industri pengolahan di daerah, seperti industri makanan dan minuman. Pendapatan dari izin usaha, pajak penjualan, dan pajak usaha industri pengolahan yang memanfaatkan bahan baku pertanian turut berkontribusi pada PAD. Dengan mengolah hasil pertanian menjadi produk bernilai tambah, daerah dapat meningkatkan pendapatan melalui pajak yang lebih tinggi.

5. KESIMPULAN

Studi ini menyimpulkan bahwa PAD memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mandailing Natal. Peningkatan PAD memungkinkan pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana bagi pembangunan yang berdampak positif pada perekonomian lokal. Berdasarkan analisis di atas, pemerintah daerah dapat memperkuat kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya lokal seperti pertanian dan pariwisata, yang dapat meningkatkan PAD secara berkelanjutan. Peningkatan PAD terbukti mampu mendukung laju pertumbuhan ekonomi. Sektor pertanian yang dominan, meskipun kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurun, masih menjadi sektor penggerak utama. Sementara itu, sektor perdagangan dan konstruksi menunjukkan potensi untuk mendukung diversifikasi sumber PAD, sehingga dapat mengurangi ketergantungan daerah pada satu sektor ekonomi saja.

6. REFERENSI

- Antonio, M. S. (2001). *Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal. (Tahun publikasi data terbaru). *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Mandailing Natal Menurut Lapangan Usaha*.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2010). *Basic Econometrics*. New York: McGraw-Hill.
- Kuncoro, M. (2014). *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Erlangga.
- M.L. JHINGAN, 2010 “*Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*” penerbit PT. RajaGrafindo Persaba, JAKARTA
- Jhingan, M. L. (2000). *Economics of Development and Planning* (33rd ed.). Vrinda Publications.
- Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus “*MakroEkonomi*” Edisi keempat, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Prathama Rahardja dan Mandala Manurung “*Teori Ekonomi Makro Suatu Pengantar*” Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Sadono Sukirno “*MakroEkonomi Teori Pengantar*” Edisi ketiga Penerbit, PT. RajaGrafindo Persaba, JAKARTA.
- Saifuddin, A. (1998). *Metodologi Penelitian*. Pustaka Pelajar.
- Todaro, M. P. (2002). *Economic Development* (8th ed.). Addison Wesley.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2005). *Economic Development* (9th ed.). Addison Wesley.

- Umar, H. (2011). *Metodologi Penelitian Kuantitatif untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Yasin, M. (2020). Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Pembangunan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Jawa Timur. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 3(2), 465–472.
<https://doi.org/10.31539/costing.v3i2.1161>